

SKRIPSI

PENYIMPANGAN TERHADAP AKTA HIBAH WASIAT



Oleh :

IKE MAY WULANDARY

NIM : 02112031

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA
2016**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PRASYARAT GELAR.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN REVISI.....	v
SURAT PERNYATAAN	vi
KARTU BIMBINGAN SKRIPSI	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Permasalahan: Latar Belakang dan Rumusan	1
1.2 Penjelasan Judul	5
1.3 Alasan Pemilihan Judul	6
1.4 Tujuan Penelitian.....	6
1.5 Manfaat Penelitian.....	7
1.5.1 Manfaat Teoritis.....	7
1.5.2 Manfaat Praktis	7
1.6 Metode Penelitian.....	7
1.6.1 Tipe Penelitian.....	7
1.6.2 Pendekatan Masalah.....	8

1.6.3	Sumber Bahan Hukum.....	8
1.6.4	Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum	9
1.7	Pertanggungjawaban Sistematika.....	10
BAB II AKIBAT HUKUM AKTA HIBAH WASIAT YANG MERUGIKAN		
	AHLI WARIS.....	11
2.1	Hibah Wasiat Menurut Hukum	11
2.2	Akibat Hukum Akta Hibah Wasiat.....	18
2.3	Wasiat yang Merugikan Ahli Waris	32
2.4	Batalnya Suatu Perjanjian	37
BAB III EKSEKUSI PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA		
	ATAS PERKARA HIBAH WASIAT	46
3.1	Kewenangan Pengadilan Agama di Bidang Kewarisan	46
3.2	Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam.....	53
3.3	Pelaksanaan Putusan.....	58
BAB IV PENUTUP.....		
4.1	Kesimpulan	80
4.2	Saran	80
DAFTAR BACAAN		82
LAMPIRAN		

ABSTRAK

Membuat wasiat (*testament*) adalah perbuatan hukum seseorang menentukan tentang apa yang terjadi dengan harta kekayaannya setelah meninggal dunia. Harta warisan seringkali menimbulkan berbagai masalah hukum dan sosial, oleh karena itu memerlukan pengaturan dan penyelesaian secara tertib dan teratur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembuatan akta wasiat (*testament acte*) notaris mempunyai peran yang sangat penting. Namun, terhadap akta hibah wasiat tersebut terdapat penyimpangan akta hibah yang dibuat di hadapan Notaris. Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapat ditentukan 2 (dua) rumusan masalahnya, yaitu: (a) Apa akibat hukum akta hibah wasiat yang merugikan ahli waris; dan (b) Bagaimana eksekusi pelaksanaan putusan Pengadilan Agama atas perkara hibah wasiat. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual.

Hasil penelitian ini adalah bahwa akibat hukum akta hibah wasiat yang merugikan ahli waris, luas objek sengketa yang dihibahkan, bertentangan dengan ketentuan hukum, dan apabila hibah tersebut terbukti merugikan hak ahli waris lainnya, maka akta hibah wasiat tersebut harus batal demi hukum.

Kata Kunci : Penyimpangan, Akta, Hibah, dan Wasiat.

ABSTRACT

Make a will (testament) is a legal act one determine what is happening with their wealth after death. Inheritance often cause many legal and social issues, and therefore require adjustment and settlement in an orderly and organized in accordance with the legislation in force. Testamentary deed (acte testament) the notary has a very important role. However, against the will grant deed contained irregularities grant deed of Notary. Based on the description of the background of the above problems, it can be determined two (2) formulation of the problem, namely: (a) What is the legal position will grant deed of Notary adverse heir; and (b) How Religion execution of execution of court decisions on grant probate case. This type of research is a normative legal research, with the statute approach, conceptual approach, and the case approach.

The results of this study is that the legal position will grant deed of Notary adverse heirs, broad object of dispute donated, contrary to the provisions of the law, and if the grant has proven detrimental to the rights of other heirs, then the deed of the grant will be canceled. While the execution of execution of court decisions on religious matters will grant that can be done in stages: (1) request for the execution of the victorious party to the Chairman of the Religious; The next (2) Religious Courts carry a warning (aanmannings); and then (3) Chairman of Religious court issued a warrant for execution in the form of confiscation execution determination letter; and (4) the execution carried out by the clerk or bailiff of the Religious Courts.

Keywords: Deviation, Deeds, Grant, and Testament.



BAB IV PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut ini:

- a. Akibat hukum akta hibah wasiat yang merugikan ahli waris tidak boleh melebihi legitimie portie dan terbukti merugikan hak ahli waris lainnya, maka akta hibah wasiat tersebut harus batal demi hukum .
- b. Eksekusi terhadap pelaksanaan putusan Pengadilan Agama atas perkara hibah wasiat yakni dapat dilakukan dengan tahapan: (1) permohonan eksekusi dari pihak yang menang kepada Ketua Pengadilan Agama; selanjutnya (2) Pengadilan Agama melaksanakan peringatan (*aanmaning*); dan selanjutnya (3) Ketua pengadilan Agama mengeluarkan surat perintah eksekusi yang berupa surat penetapan sita eksekusi; dan (4) pelaksanaan eksekusi yang dilaksanakan oleh panitera atau jurusita pada Pengadilan Agama.

1.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka dapat diajukan saran sebagai berikut:

- a. Sebaiknya Notaris dalam membuat akta hibah wasiat memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni tidak boleh melebihi litimie portienya yaitu 1/3 (sepertiga) bagian dari harta pewasiat.
- b. Sebaiknya praktisi hukum atau pegawai Pengadilan Agama dalam melaksanakan eksekusi putusan Pengadilan Agama harus sudah berkoordinasi dengan pihak

berwajib atau instansi yang terkait wilayah lingkungan sekitar, agar ketika pelaksanaan eksekusi dapat diminimalisir terjadinya kegagalan dalam mengesekusi obyek sengketa .



DAFTAR BACAAN

LITERATUR:

- Abdul Ghafur Anshari, *Peradilan Agama di Indonesia Pasca UU No. 3 Tahun 2006*, UII Pers, Yogyakarta, 2007.
- Afdol, *Penerapan Hukum Waris Islam Secara Adil Dengan Metode Perhitungan Mudan dan Praktis*, Airlangga University Press, Surabaya, 2010
- Ahmad Rofik, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Al-Qalyubi dan Al-Umairah, *Hasyiatani 'ala Minhajit Thalibin*, Dar al-Fikr, Juz 3, Beirut, tanpa tahun.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Kencana, Jakarta, 2005.
- Anisitus Amanat, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-pasal Hukum Perdata BW*, Erlangga, Semarang, 2001.
- A. Sukri Sumardi, *Hukum Waris Islam di Indonesia (Perbandingan Kompilasi Hukum Islam dan Fiqih Sunni)*, Aswaja Presindo, Yogyakarta, 2013.
- Azhar Ahmad Basyir, *Hukum Islam tentang Wasiat*, Yogyakarta, 1972.
- Buku II Pedoman, *Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama*, Edisi 2007, Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2008.
- C.F.G. Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Alumni, Bandung, 1994.
- Darwan Prints, *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2007.

Djamanat Samosir, *Hukum Acara Perdata Tahap-tahap Penyelesaian Perkara Perdata*, Nuana Aulia, Bandung, 2011.

Djazuli Bachar, *Eksekusi Putusan Perkara Perdata, Segi Hukum dan Penegakan Hukum*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1987.

Efa Laela Fakhriah, *Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata*, Alumni, Bandung, 2011.

Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Al-Ma'arif, Yogyakarta, 1975.

G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1982.

Habib Adjie, *Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan)*, Mandar Maju, Bandung, 2009.

Hartono Soerjopratiknjo, *Hukum Waris Testamenter, Seksi Notariat Fakultas Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Cetakan ke-1, Yogyakarta, 1982.

Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Quran dan Hadits*, Tinta Mas, Jakarta, 1964.

Hulman Panjaitan, *Kumpulan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 1953-2008 Berdasarkan Penggolongannya*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014.

H.P. Panggabean, *Praktik Standard Contract Perjanjian Baku) Dalam Perjanjian Kredit Perbankan*, Alumni, Bandung, 2012.

J. Satrio, *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.

Jaih Mubarok (Ed.), *Peradilan Agama di Indonesia*, Pustaka Bani Quraisy, Bandung, 2004.

Mariam Darus Badruzaman, *K.U.H.Perdata Buku III Tentang Hukum Perikatan Dengan Penjelasannya*, Alumni, Bandung, 2006.

Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

M. Hasan Ali, *Hukum Warisan dalam Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1996.

Moch. Idris Ramulyo, *Studi Kasus Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dan Praktek di Pengadilan Agama Pengadilan Negeri*, Ind-Hill-Co., Jakarta, 1994.

Muhammad Amin Suma, *Keadilan Hukum Waris Islam Dalam Pendekatan Teks dan Konteks*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013.

Muhammad Iqbal. *Dinar Solution*, Gema Insani Press, Jakarta, 2008.

Mukti Arto, *Prkatek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.

Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.

Musthafa Ahmad al Zarqa', *al-madkhal al-Fiqh al-'Amm*, Jilid I, Darul Fikr, Beirut, 1968.

M. Tahir Azhari, *Bunga Rampai Hukum Islam*, In Hill Co. Jakarta, 2003.

M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Gramedia, Jakarta, 1991.

_____, *Hukum Acara Perdata; tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakrta, 2006.

Oemar Salim, *Dasar-dasar Hukum Waris di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013.

Retnowulan Sutantio & Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 1989.

Richard Eddy, *Aspek Legal Property - Teori, Contoh, dan Aplikasi*, Andi Offset, Yogyakarta, 2010.

Ropuan Rambe dan A. Mukri Agafi, *Implementasi Hukum Islam*, Perca, Jakarta, 2001.

R. Supomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1986, h. 119.

R. Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Binacipta, Bandung, 1982.

_____, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1985.

_____, dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Cetakan ke-27, Jakarta, 1995.

_____, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 2003.

Said Agil Husin Al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, Penamadani, Jakarta, 2004.

Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, UI Press, Jakarta, 1994.

_____, *Receptio A Contrario: Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam*, Bumi Aksara, Jakarta. Tanpa tahun.

Sembiring MU, *Beberapa Bab Penting Dalam Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Program Pendidikan Notariat, Fakultas Hukum Usu, Medan, 1989.

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2002.

S. Tamakiran, *Asas-Asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum*, Pionir Jaya, Bandung, 1992.

Syarif Mappiase, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2015.

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1992.

Yohanes Sogar Simamora, *Hukum Perjanjian Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang Dan Jasa Oleh Pemerintah*, LaksBang, PRESSindo, Yogyakarta, 2009.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234.

Kompilasi Hukum Islam.

SUMBER LAIN

Yodi Martono Wahyunadi, *Prosedur Beracara di Tingkat Pengadilan Tata Usaha Negara*, <http://www.ptun-bengkulu.go.id>. diakses pada tanggal 14 Maret 2016.